

SINOPSIS

Pendidikan merupakan aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas serta mampu bersaing dengan keadaan yang semakin mengalami kemajuan. Beberapa daerah seperti kota Yogyakarta berusaha untuk memberikan program kebijakan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik serta memiliki kualitas yang unggul. Salah satunya adalah program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD. Program ini berupa bantuan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat atau KMS. Kartu Menuju Sehat atau KMS merupakan identitas diri bagi keluarga miskin yang telah ditetapkan melalui parameter yang telah ditetapkan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk tetap memperoleh pendidikan yang layak serta berkualitas. Untuk itulah penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Jaminan pendidikan Daerah atau JPD bagi peserta didik yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat atau KMS.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dimana sumber utama dalam penulisan ini adalah wawancara secara mendalam dengan kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah kota Yogyakarta selaku pengelola program, kepala bagian tata usaha UPT Jaminan Pendidikan Daerah kota Yogyakarta selaku staf pelaksana program, kepala bagian KMS Dinsos Bapak Tri Hastomo serta masyarakat penerima JPD. Data lain juga diperoleh melalui buku, artikel, leaflet, serta beberapa dokumen terkait dengan landasan dasar program Jaminan Pendidikan Daerah yang diperoleh dari UPT Jaminan Pendidikan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah diketahui bahwa implementasi program JPD sudah berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari adanya ketepatan sasaran program walaupun memang masih terdapat satu warga masyarakat miskin yang belum mendapatkan JPD. Hal ini berdasarkan pada interview dengan 10 narasumber penerima JPD di daerah Lempuyangan dan Krumpyak. Untuk itu tidak menutup kemungkinan ada hal yang sama di daerah lain. Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan JPD untuk tahun yang akan datang antara lain dalam aspek komunikasi. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh seluruh staf di UPT JPD akan menghambat serta mempengaruhi pelaksanaan program pada tahun selanjutnya. Selain itu aspek birokrasi yang pendek dengan tugas dan wewenang yang cukup banyak berdampak pada lamanya proses pendapatan JPD.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa program sudah berjalan baik. Tetapi perlu adanya tinjauan yang lebih baik lagi agar ditahun depan dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.